



**PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH
DAN TEMUAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

SANGGAM SIMARMATA

NPM : 1515100328

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**



FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : SANGGAM SIMARMATA
NPM : 1515100328
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH KARAKTERISTIK
PEMERINTAH DAERAH DAN TEMUAN
AUDIT BPK TERHADAP KINERJA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA

MEDAN, OKTOBER 2019

KETUA PROGRAM STUDI

(JUNAWAN, SE., M.Si)

DEKAN



(Dr. SURYA NITA, SH., M.Hum)

PEMBIMBING I

(RAHIMA BR. PURBA, SE., M.Si., Ak., CA)

PEMBIMBING II

(YUNITA SARI RIONI, SE., M.Si., Ak., CA)



**SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN
PERSETUJUAN UJIAN**

NAMA : SANGGAM SIMARMATA
NPM : 1515100328
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH KARAKTERISTIK
PEMERINTAH DAERAH DAN TEMUAN
AUDIT BPK TERHADAP KINERJA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
SUMATERA UTARA

KETUA PROGRAM STUDI



ANGGOTA II

(YUNITA SARI RIONI, SE., M.Si., Ak., CA) (Dra Mariyam, Ak, Msi., CA)

ANGGOTA IV

(Drs Mulkanuddin Ritonga, MM.Ak)

MEDAN, OKTOBER 2019
ANGGOTA-I

(RAHIMA BR. PURBA, SE., M.Si., Ak., CA)

ANGGOTA-III

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sanggam Simarmata
NPM : 1515100328
Fakultas/Program Studi : Sosial Sains/Akuntansi
Judul rencana : Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan
Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah
Daerah Provinsi Sumatera Utara

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain.
2. Memberi izin hak beban Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Medan, Oktober 2019



(SANGGAM SIMARMATA)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sanggam Simarmata
Tempat / Tanggal Lahir : Beringin Makmur, 8 November 1995
NPM : 1515100328
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Akuntansi
Alamat : Ayahanda jl. Buku no.39

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan seperlunya.

Medan, Oktober 2019



(Sanggam Simarmata)

TANDA BEBAS PUSTAKA
 No. 788/Perp/BP/2019
 Dinyatakan tidak ada sangkut paut dengan UPT. Perpustakaan
 24 SEP 2019
 Ka. Perpustakaan
 Sugilarp. S. Sds. S.Pd.1

FM-BPAA-2012-041

Pemohonan Meja Hijau

Medan, 24 September 2019
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Telah Diperiksa oleh LPMU
 dengan Plagiarisme 38%
 Medan, 24 SEPTEMBER 2019
 Ka. LPMU
 Cahyo Pramono, SE, MM

Hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : SANGGAM SIMARMATA
- Tgl. Lahir : BERINGIN MAKMUR / 8 NOPEMBER 1995
- Orang Tua : ANTONIUS SIMARMATA
- NPM : 1515100328
- Prodi : SOSIAL SAINS
- Studi : Akuntansi
- No. HP : 082389525546
- Alamat : Jl. Ayahanda Gg Buku

Bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Sumatera Utara terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya saya menyatakan :

- 1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
- 2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
- 3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
- 4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
- 5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
- 6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
- 7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
- 8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
- 9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
- 10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
- 11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
- 12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	0
Total Biaya	: Rp.	2,100,000
5. UK Termin 50% dr 1 tahun Rp		2.625.000
		<u>4.725.000</u>

25/9
Dita

Ukuran Toga : **S**

UNPAB
 Ditetapkan di
 Nita, S.H., M. Hum.
 Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya

 SANGGAM SIMARMATA
 1515100328

Telah di terima
 berkas persyaratan
 dapat di proses
 Medan, 25-09-2019
 Ka. BPAA
 an.

UKM CENTER
 PANCA BUDI
 25/9
2019

- Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:

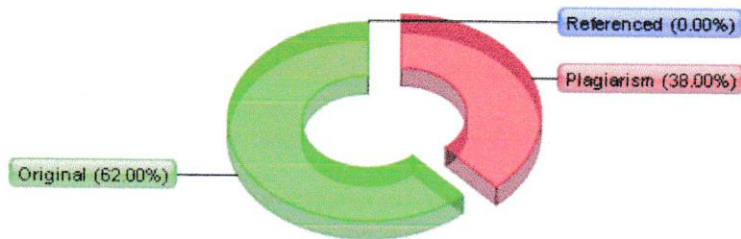
Analyzed document: 19/09/2019 10:30:22

"SANGGAM SIMARMATA_1515100328_AKUNTANSI.docx"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License4



Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

wrds: 2642	http://repository.unpas.ac.id/14282/5/BAB%202.pdf
wrds: 2306	http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/2013/08/e-journal-GIDEON-SIMANULLANG-07042010...
wrds: 1154	http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t30030.pdf

Other Sources:]

Processed resources details:

80 - Ok / 283 - Failed

Other Sources:]

Important notes:

Wikipedia:	Google Books:	Ghostwriting services:	Anti-cheating:
Detected!	[not detected]	[not detected]	[not detected]



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : SANGGAM SIMARMATA
 Tanggal/Tgl. Lahir : / 08 November 1995
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1515100328
 Bidang Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 127 SKS, IPK 3.41

Yang ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

Judul SKRIPSI	Persetujuan
Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah kota medan	<input checked="" type="checkbox"/>
Efektivitas dan kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kota medan	<input type="checkbox"/>
Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	<input type="checkbox"/>

Yang disetujui oleh Kepala Program Studi diberikan tanda

Rektor

 (Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 05 Oktober 2018

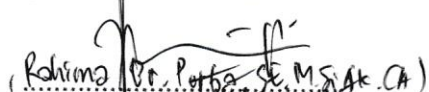
Pemohon,


 (Sanggam Simarmata)

Nomor :
 Tanggal :
 Disahkan oleh :
 Dekan

 (Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)
 Tanggal : 08 Oktober 2018
 Disetujui oleh :
 Ka. Prodi Akuntansi

 (Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si)

Tanggal : 05 Oktober 2018
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 (Rahma D. Perba, SE, M.Si, Ak. CA)
 Tanggal : 08 Oktober 2018
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing II :

 (Yupiter, SE)

Dokumen: FM-LPPM-08-01 Revisi: 02 Tgl. Eff: 20 Des 2015



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Pembimbing I : Rahima br. Purba SE, M.Si, CA
 Pembimbing II :
 Mahasiswa : SANGGAM SIMARMATA
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1515100328
 Bidang Pendidikan : Pengaruh Karakteristik SI
 Tugas Akhir/Skripsi : Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan
 Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah
 Daerah Provinsi Sumatera Utara.

ANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
2019	Revisi Proposal		
2019	Data		
2019	Pembahasan		
2019	Ace Sidang		

Medan, 20 Agustus 2019
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Pembimbing I :
 Pembimbing II : Yunita Sari Rioni SE, Msi, Ak, CA
 Nama Mahasiswa : SANGGAM SIMARMATA
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1515100328
 Bidang Pendidikan : SI
 Tugas Akhir/Skripsi : Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara.

ANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
15/19	- Perbaiki daftar pustaka - Teori Min 10 tahun terakhir - Semua teori masukkan ke daftar pustaka - Spasi	YSR	
16/19	- Semua teori masukkan ke daftar pustaka - Spasi - Perbaiki daftar Pustaka	YSR	
17/19	- Spasi - Tabel	YSR	

18/19 ACC Sibang

Medan, 20 Agustus 2019
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Pembimbing I : Rahima Br. Purba, SE, M.Si, Ak, CA
 Pembimbing II : Yunita Sari Pioni, SE, M.Si, Ak
 Mahasiswa : SANGGAM SIMARMATA
 Program Studi : Akuntansi
 Pokok Mahasiswa : 1515100328
 Pendidikan :
 Tugas Akhir/Skripsi : Pengaruh karakteristik Pemerintah Daerah
 Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja
 Pemerintah Daerah Kota Medan.

WAKTU	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
2019.	latar belakang & Identifikasi Mslh.	<i>[Signature]</i>	
2019.	Bab II, & Rumusan Masalah. ↓ Tujuan ↔ Hipotesis Bab III → sampel → sampel jemb.	<i>[Signature]</i>	
2019.	Acc Seminar Proposal	<i>[Signature]</i>	
			<i>[Signature]</i>

Medan, 11 April 2019
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,

[Signature]
 Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Pembimbing I :
 Pembimbing II : Yunita Sari Rioni S.E.M.si.Ak.
 Mahasiswa : SANGGAM SIMARMATA
 Program Studi : Akuntansi
 Pokok Mahasiswa : 1515100328
 Pendidikan :
 Tugas Akhir/Skripsi :

Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah
 Dan Temuan Audit BPK Terhadap
 Kinerja Pemerintah Daerah kota Medan

NO	REVISI	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
1		- Perbaiki spasi - DAFTAR PUSTAKA - Tabel - Cover	Ygr	
2	1/5	- Perbaiki Cover - DAFTAR PUSTAKA - Spasi	Ygr	
3	1/5	- DAFTAR PUSTAKA - DAFTAR ISI	Ygr	
4	1/5	ACC Seminar Proposal	Ygr	

Medan, 11 April 2019
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,

Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA
Jl. Imam Bonjol No.22 Telp. (061) 4519039 Fax. (061) 4538140 Medan
20152

20 Mei 2019

Nomor : 569a/S/XVIII.MDN/5/2019
Perihal : Jawaban atas permintaan data untuk keperluan dalam penulisan skripsi

Kepada Yth.
Dekan Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi
di
Medan

Menunjuk Surat dari Dekan Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Nomor 4779/17/FSSA/2019 tanggal 26 April 2019 perihal Permohonan *research* dengan atas nama Sanggam Simarmata (NPM 1515100328) judul skripsi "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Medan" di kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, bersama ini kami sampaikan bahwa kami dapat menyetujui permohonan permintaan data untuk keperluan penulisan skripsi mahasiswa tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Perwakilan,

Dra. V M. Ambar Wahyuni, M.M., Ak., CA.
NIP. 196009241990032002



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jln. Jend. Gatot Subroto Km.4,5 PO.BOX.1099 Telp. (061) 8455571 Medan
Email : fasosa@pancabudi.ac.id <http://www.pancabudi.ac.id>

BERITA ACARA
PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Pada hari ini, Rabu.. Tanggal, 09. Bulan, Oktober.. Tahun, 2019....., telah melaksanakan Ujian Meja Hijau Pada Program Studi Akuntansi..... Semester I tahun Akademik 2015..... bagi mahasiswa/i atas nama :

Nama : Senggam Sirmata
Npm : 15.15.100.328
Program Studi : Akuntansi
Tanggal Ujian : 09 Oktober 2019
Judul Skripsi Lama : Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Timbulnya Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Medan
Judul Skripsi Baru : Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Timbulnya Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara

Dinyatakan benar bahwa dalam pelaksanaan ujian Meja Hijau mahasiswa tersebut diatas telah terjadi perubahan judul skripsi yang telah dikendaki oleh Panitia Ujian Meja Hijau.

NO	JABATAN	NAMA DOSEN	TANDA TANGAN
1	Ketua Penguji/ Ketua Program Studi	Jurawan SE., M.Si	
2	Anggota I/ Pembimbing I	Rahima br. Purba, SE, M.Si, AKSA	
3	Anggota II/ Pembimbing II	Tintha S. Rioni SE, M.Si, AKSA	
4	Anggota III/ Penguji I	Dra. Marjani, Ak. M.Si, CA	
5	Anggota IV/ Penguji II	Drs. M. Tulkonuddin Rionga, M.MAK	

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat-Nya dan karunia-Nya yang tiada tara kepada kita semua terutama kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatra Utara**” ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program studi akuntansi di Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi untuk memperoleh gelar Strata (S1) Sarjana Ekonomi.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bimbingan, arahan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi
2. Ibu Dr. Surya Nita, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Junawan, SE.,M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi.
4. Ibu Rahima br.Purba, SE.,M.Si, selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberi arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Ibu Yunita Sari Rioni, SE.,M.Si., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan mengenai ketentuan penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan rapi dan sistematis.
6. Kepada seluruh pimpinan dan Staff pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah memberikan banyak bantuan serta data yang dibutuhkan untuk melaksanakan riset ditempat tersebut.
7. Teristimewa kepada yang tercinta orang tua penulis Ayahanda alm. Antonius simarmata dan Ibunda Rosmainim br.Manik, kakak saya Fasca Noralita Simarmata, Minar Simarmata, Roma Adelia Simarmata, Yolanda Simarmata, abg saya Hatorangan Simarmata dan adik tercinta Badia Simarmata. Beserta keluarga yang selalu mendoakan, memberikan dukungan motivasi dan pengorbanannya baik dari segi moril, materi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada sahabat-sahabat saya Cronika Yuni Azahari br.Manalu, Luh Kandi Ayu Tangkas, Tetty Rgg dan seluruh teman-teman kampus khususnya akuntansi pagi dan siang stambuk 2015, dan masi banyak lagi yang belum saya sebutkan terima kasih atas dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Penulis mengharapkan masukan dan saran dari para pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca. Terimakasih

Medan, Agustus 2019

Penulis

Sanggam Simarmata

ABSTRAK

Adapun judul pada penelitian ini adalah Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jelas bagaimana pengaruh ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan daerah dan temuan audit terhadap kinerja pemerintah Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Utara . Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dari data sekunder yaitu laporan Badan Pusat Statistik dan Badan Pemeriksa Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ukuran daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Utara. Variabel tingkat kekayaan daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Utara. Variabel tingkat ketergantungan daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Utara. Variabel temuan audit secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Utara. Ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan daerah dan temuan audit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Utara.

Kata Kunci : (Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah)

ABSTRACT

The title of this research is the Effect of Regional Government Characteristics and BPK Audit Findings on the Performance of the Regional Government of North Sumatra Province ". This study aims to find out more clearly how the influence of the size of the area, the level of regional wealth, the level of regional dependence and audit findings on the performance of the City and Regency of North Sumatra Province. This research uses quantitative methods. Data collection is carried out from secondary data, namely reports from the Central Statistics Agency and the Supreme Audit Agency. The results showed that the regional size variable partially had a significant effect on the performance of the City and Regency of North Sumatra Province. The variable level of regional wealth partially has a significant effect on the performance of the City and Regency of North Sumatra Province. The variable level of regional dependence partially does not significantly influence the performance of the City and Regency of North Sumatra Province. The audit findings variable partially did not significantly influence the performance of the City and Regency of North Sumatra Province. The size of the region, the level of regional wealth, the level of regional dependence and audit findings simultaneously have a significant effect on the performance of the City and Regency Governments of North Sumatra Province.

Keywords: (Regional Government Characteristics and BPK Audit Findings on Local Government Performance)

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I	PENDAHULUAN
A.	Latar Belakang Masalah..... 1
B.	Identifikasi 7
C.	Batasan dan Rumusan Masalah 8
1.	Batasan Masalah 8
2.	Rumusan Masalah..... 8
D.	Tujuandan Manfaat Penelitian 9
1.	Tujuan Penelitian 9
2.	Manfaat Penelitian 9
E.	Keaslian Penelitian..... 10
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA
A.	Landasan Teori..... 12
1.	Teori Agensi Dalam Pemerintahan..... 12
2.	Laporan Keuangan Daerah 13
3.	Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah 19
4.	Karakteristik Pemerintah Daerah 20
a.	Ukuran Pemerintah (Size) Daerah 20
b.	Tingkat Kekayaan Daerah 21
c.	Tingkat Ketergantungan dengan pemerintah pusat . 23
d.	Belanja Modal 23
5.	Temuan BPK 24
B.	Penelitian Terdahulu 25
C.	Kerangka Konseptual 27
D.	Hipotesis 28

BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Pendekatan Penelitian	29
	B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	29
	2. Lokasi Penelitian	29
	1. Waktu Penelitian.....	29
	C. Populasi dan Sampel	30
	1. Populasi	30
	2. Sampel.....	30
	D. Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional.....	31
	E. Jenis dan Sumber Data	33
	F. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Hasil Penelitian	45
	1. Gambaran Umum Instansi Pemerintah Sumatera Utara .45	
	a. Sejarah Ringkas	45
	b. Visi dan Misi	46
	c. Perioritas Pembangunan Sumatera Utara	47
	d. Kabupaten / Kota di Provinsi Sumatera Utara.....	48
	2. Analisis Deskriptif.....	48
	3. Uji Asumsi Klasik.....	52
	4. Analisis Data	54
	5. Regresi Linier Berganda	56
	6. Uji Kesesuaian	58
	B. Pembahasan.....	62
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	65
	B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Kinerja Beberapa Pemerintah Daerah Di Sumatra Utara Urutan Pada Tahun 2016	5
Tabel 2.1 Daftar Penelitian Sebelumnya	25
Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian	30
Tabel 3.2 Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional	32
Tabel 4.1 Daftar Kabupaten Dan Kota Sumatra Utara	48
Tabel 4.2 Data Deskriptif	48
Tabel 4.3 Uji Multikolinieritas	54
Tabel 4.4 Descriptive Statistic	55
Tabel 4.5 Correlations	55
Tabel 4.6 Regresi Linier Berganda	57
Tabel 4.7 Uji Simultan	58
Tabel 4.8 Uji Parsial	59
Tabel 4.9 Koefisien Determinasi	61

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	27
Gambar 4.1 Histogram Uji Normalitas	52
Gambar 4.2 PP Plot Uji Normalitas	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola dan mengatur daerahnya masing-masing sesuai dengan kemampuan daerah. Salah satu bentuk evaluasi yang telah secara rutin dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, adalah Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah (EKPPD). Payung hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD). Menurut PP tersebut pasal 1, EKPPD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja. EKPPD menggunakan LPPD sebagai sumber informasi utama yang difokuskan pada informasi capaian kinerja pada tataran pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan menggunakan indikator kinerja kunci (Mustikarini dan Fitriyani:2009)

Pengukuran kinerja merupakan komponen yang penting sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan suatu organisasi. Sektor publik tidak bisa lepas dari kepentingan umum sehingga pengukuran kinerja mutlak diperlukan untuk mengetahui seberapa berhasil misi sektor publik tersebut dapat dicapai oleh penyedia jasa dan barang-barang publik. Sumarjo (2010)

menjelaskan bahwa fungsi dari pengukuran kinerja dapat menjelaskan mengenai evaluasi bagaimana program tersebut berjalan, sarana perbandingan atas pelayanan yang diberikan, dan sebagai alat komunikasi dengan publik.

Penelitian yang dilakukan Sumarjo (2010) juga mengungkapkan bahwa dengan melakukan pengukuran kinerja, pemda memperoleh informasi yang dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan sehingga akan meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Penelitian terkait kinerja pemda dilakukan oleh Mustikarini dan Fitriyani (2012). Sudarsana dan Rahardjo (2013) juga melakukan penelitian yang sama yaitu menguji pengaruh ukuran pemda, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja daerah dan temuan audit BPK terhadap skor kinerja pemda kabupaten/kota di Indonesia tahun anggaran 2010; namun penelitian menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Hal tersebut dilihat dari hasil penelitian Astuti (2009) bahwa ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan daerah memiliki pengaruh positif terhadap skor kinerja pemda kabupaten/kota, sedangkan hasil penelitian Sudarsana dan Rahardjo (2013) menunjukkan tidak ada tingkat kekayaan daerah dan belanja daerah terhadap skor kinerja pemda kabupaten/kota.

Ukuran pemerintah (*Size*) adalah suatu nominal yang dapat mendiskripsikan sesuatu. Suatu pemerintah daerah yang berukuran besar memiliki jumlah dan transfer kekayaan yang besar pula, sehingga pemerintah daerah akan mendapatkan pengawasan yang lebih besar Sudarsana dan Rahardjo (2013). Pemerintah daerah yang besar juga lebih kompleks dalam pengelolaan keuangannya, sehingga semakin banyak informasi keuangan

yang harus dilaporkan untuk mengurangi terjadinya asimetri informasi. Pemerintah daerah yang memiliki ukuran atau memiliki aset yang lebih besar akan memiliki tekanan yang besar pula dari publik untuk menyajikan laporan keuangannya sebagai upaya meningkatkan transparansi dan mengurangi asimetri informasi. Pemerintah daerah yang memiliki ukuran atau memiliki aset yang lebih besar akan memiliki tekanan yang besar pula dari publik untuk menyajikan laporan keuangannya sebagai upaya meningkatkan transparansi dan mengurangi asimetri informasi.

Kekayaan (*wealth*) pemerintah daerah dapat dinyatakan dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Sumarjo, 2010). Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. (Undang-Undang No.33 Tahun 2004. Kekayaan adalah kemampuan dalam mencukupi kebutuhan Kekayaan suatu negara dapat diukur dengan berbagai macam ukuran yang tidak selalu sama karena setiap orang memiliki pandangan hidup yang berbeda sehingga tolok ukur dari kesejahteraan juga akan berbeda.

Mustikarini (2012) menyatakan, salah satu sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD yang tinggi dimiliki oleh pemerintah daerah akan memudahkan kinerja atas transaksi pengeluaran atau belanja daerah sebagai kebutuhan Pemda. Menurut Panji

(2009) *intergovernmental revenue* adalah jenis pendapatan Pemerintah Daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai operasi pemerintah daerah. Untuk mengetahui tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dapat diukur dengan besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) dibandingkan dengan total pendapatan. Mustikarini dan Fitria, (2012).

Untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pengelolaan keuangan harus dilakukan secara baik, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan keuangan daerah merupakan unsur penting dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) suatu pemda, sehingga perlu dilakukan pengawasan dan pemeriksaan (audit) yang baik oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar tidak terjadi kecurangan. Dalam UU No. 15 Tahun 2004 mengenai pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pemeriksaan didefinisikan sebagai proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK salah satunya berupa temuan audit. Hasil penelitian Widya Astuti (2009) dan penelitian Yayuk Harumiati (2012) menyatakan bahwa temuan audit BPK berpengaruh negatif terhadap skor kinerja pemda kabupaten/kota. Hal tersebut dikarenakan semakin besar temuan audit menunjukkan banyaknya pelanggaran yang dilakukan pemda terhadap peraturan perundangan. Dengan demikian temuan audit BPK

dapat memengaruhi kinerja pemda kabupaten/kota.

Pemerintah daerah kabupaten/kota se-Sumatera Utara adalah salah satu pemerintah daerah yang berupaya menyediakan layanan publik semaksimal mungkin agar pencapaian tujuan pembangunan nasional menjadi semakin besar. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya sistem pengendalian, evaluasi dan pengukuran kinerja yang sistematis untuk mengukur kemajuan yang dicapai. Pemerintah daerah lebih bertanggungjawab (*akuntabel*) dan transparan dalam setiap kebijakan, tindakan, dan kinerja yang dihasilkan.

Berikut disajikan tabel yang menggambarkan kinerja beberapa daerah kota dan kabupaten yang ada di Sumatera Utara.

Tabel 1.1 Kinerja Beberapa Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara Pada Tahun 2016

No	Kabupaten/Kota	Realisasi Pengeluaran (000)	Alokasi Anggaran (000)	Kinerja (%)
1	Kabupaten Nias	Rp 796.267.893.540	Rp 961.460.307.312	82,82
2	Kabupaten Mandailing Natal	Rp 1.210.230.197.267	Rp 1.405.739.733.820	86,09
3	Kota Gunung sitoli	Rp 705.994.577.295	Rp 886.174.944.646	79,67
4	Kota Medan	Rp 4.523.672.134.655	Rp 5.735.922.591.995	78,87
5	Kota Tebing tinggi	Rp 471.970.083.481	Rp 582.196.413.997	81,07
6	Kabupaten Tapanuli Tengah	Rp 979.815.307.818	Rp1.144.449.253.992	85,61
7	Kabupaten Labuhan Batu	Rp 1.126.516.217.551	Rp 1.323.603.221.192	85,11

Sumber : LK BPK 2016

Dalam proses pengelolaan keuangan pemerintah daerah provinsi dan kota se Sumatera Utara, tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun.

Berdasarkan pada laporan kinerja pemerintah daerah sumatera utara di

berbagai kabupaten dan kota dilihat bahwasannya kinerja pemerintah daerah kabupaten dan kota di Sumatera Utara masih rendah hal ini mengindikasikan bahwa tata kelola pemerintah daerah masih belum sesuai dengan harapan yang ditetapkan sesuai anggaran pembangunan daerah provinsi Sumatera Utara.

Beberapa hal hal yang menyebabkan perbedaan kinerja itu sendiri yaitu perbedaan karakteristik pemerintah daerah provinsi dan kota yang ada di Sumatera Utara menjadi salah satu penyebab perbedaan ukuran atau kekayaan pemerintah daerah sehingga total pendapatan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kota berbeda. Tingkat kekayaan daerah yang diukur dari pendapatan asli daerah baik dari pajak dan retribusi tiap daerah yang ada di provinsi Sumatera Utara berbeda, Adapun perbedaan karakteristik nilai nominal transfer yang diterima pemerintah daerah berbeda sesuai dengan Dana Alokasi Umum yang ditetapkan oleh APBN menyebabkan perbedaan pendapatan yang diperoleh oleh pemda.

Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menilai sejumlah Pemerintah Daerah di provinsi Sumatera Utara tidak serius dalam mengelola aset jika di lihat dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terlihat pada Laporan Hasil Pemeriksaan beberapa tahun terakhir di Provinsi Sumatera Utara. Kemudian, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut mengungkapkan bahwa ada beberapa Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara yang belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) seperti Pemerintah Kota Medan. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara memberikan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) karena Pemerintah Daerah tersebut

mengalami keterlambatan dalam pembuatan laporan LKPD. Dengan opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwasannya ada kejanggalan atas temuan Badan Pemeriksaan Keuangan atas kinerja pelaporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan yang dapat berdampak pada persepsi public atas kinerja pemerintah daerah kota medan yang tidak sesuai dengan tata kelola yang ditetapkan oleh undang –undang.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik mengangkat judul penelitian ini yaitu **“Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara”**.

B. Identifikasi

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Kinerja pemerintah daerah beberapa kabupaten dan kota di Sumatera Utara masih rendah hal ini mengindikasikan bahwa tata kelola pemerintah daerah masih belum sesuai dengan harapan yang ditetapkan sesuai dengan alokasi anggaran pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara.
- b. Perbedaan ukuran daerah yang dilihat dari kekayaan pemerintah daerah menyebabkan perbedaan alokasi prioritas anggaran pembangunan daerah.
- c. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara memberikan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) terhadap beberapa daerah di Provinsi Sumatera

Utara yang mengindikasikan adanya temuan pelanggaran terhadap tata kelola pemerintah daerah.

C. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini mencakup Ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan kepada pusat, belanja daerah dan temuan audit adalah sebagai variabel bebas (variabel independen atau X_1 , X_2 , X_3), sedangkan Kinerja adalah variabel terikat (variabel dependen atau Y). Masalah yang dibatasi termasuk variabel, lokasi dan waktu penelitian. Pada penelitian ini penelitian di lakukan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah dibatasi sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

- a. Apakah ukuran daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
- b. Apakah tingkat kekayaan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
- c. Apakah tingkat ketergantungan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
- d. Apakah temuan audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

- e. Apakah ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan daerah dengan pusat dan temuan audit berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah maka penelitian ini bertujuan yaitu:

- a. Untuk menganalisis apakah ukuran daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
- b. Untuk menganalisis apakah tingkat kekayaan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
- c. Untuk menganalisis apakah tingkat ketergantungan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
- d. Untuk menganalisis apakah temuan audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
- e. Untuk menganalisis apakah ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan daerah dengan pusat dan temuan audit berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan yang penulis dapatkan selama perkuliahan di dalam kondisi praktis yang ada

di sekitar masyarakat serta merupakan sarana pengembangan wawasan dan pengembangan analisis tentang pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah dan juga sebagai salah satu syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar sarjana

b. Bagi Penelitian lanjutan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perbandingan dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama sebagai bahan evaluasi.

c. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan dorongan agar lebih banyak belajar dan mendapatkan pengalaman secara intensif (ilmu).

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Galang Afran (2016) dari Universitas Riau yang berjudul : “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit BPK Dan Leverage Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau). Sedangkan penelitian ini berjudul : “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara”.

Perbedaan penelitian terletak pada :

1. **Variabel Penelitian** : Penelitian terdahulu menggunakan 5 (lima) variabel bebas yaitu ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan daerah, temuan hasil audit dan leverage dan 1 (satu)

variabel terikat yaitu kinerja pemerintah daerah. Sedangkan penelitian ini menggunakan 4 (empat) variabel bebas yaitu bebas yaitu ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan daerah, temuan hasil audit dan 1 (satu) variabel terikat yaitu Kinerja.

2. **Model Penelitian** : Dalam penelitian terdahulu menggunakan model penelitian path analisis untuk 6 (enam) variabel, Sedangkan penelitian ini menggunakan regresi berganda untuk 5 (lima) variabel.
3. **Jumlah Observasi / Sampel (n)** : Penelitian terdahulu berjumlah 12 kota atau kabupaten sedangkan penelitian ini berjumlah 10 kota atau kabupaten.
4. **Waktu Penelitian** : Penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2016, sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2019.
5. **Lokasi Penelitian** : Lokasi penelitian terdahulu di Riau, sedangkan penelitian ini dilakukan di Medan. Perbedaan model penelitian, variabel penelitian, jumlah observasi/ sampel, waktu dan lokasi penelitian menjadikan perbedaan yang membuat keaslian penelitian ini dapat terjamin dengan baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Agensi Dalam Pemerintahan

Menurut Setiawan (2012) mengenai teori keagenan, pengelolaan pemerintah daerah harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan terhadap berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Hasil kinerja yang telah dilaksanakan oleh Pemda akan menghasilkan informasi yang disampaikan kepada masyarakat haruslah transparan dan akuntabel. Hal itu bertujuan agar mampu memberikan informasi yang berimbang antara pihak *agent* dengan *principal*. Dengan demikian informasi yang disampaikan akan mengurangi adanya *information asymatry* maka kemungkinan tindak kejahatan korupsi akan berkurang.

Dalam teori keagenan terdapat dua pihak yang melakukan kesepakatan atau kontrak, yakni pihak yang memberikan kewenangan yang disebut *principal* dan pihak yang menerima kewenangan yang disebut *agen* (Abdullah dan Halim 2009). *Agency problem* muncul ketika *principal* mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan kepada *agen*. Teori keagenan memandang bahwa pemerintah daerah sebagai *agen* bagi masyarakat *principal* akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri serta memandang bahwa pemerintah daerah

tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat. *Agency theory* beranggapan bahwa banyak terjadi *information asymmetry* antara pihak agen (pemerintah) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak principal (masyarakat). Adanya *information asymmetry* inilah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh agen. Sebagai konsekuensinya, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan akuntabilitas atas kinerjanya sebagai mekanisme *checks and balances* agar dapat mengurangi *information asymmetry* (Setiawan 2012).

2. Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai data dan juga bisa dikatakan sebagai informasi. Data dapat berubah informasi jika diubah kedalam konteks yang memberikan makna.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 1 prg 3/ PP No. 17 tahun 2010 menjelaskan definisi Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, termasuk lembaga legislatif, pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta

pemerintah. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.

Pemerintah daerah harus mengelola dan melaporkan keuangannya secara akuntabel dan transparan. UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara yang kemudian diikuti dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 yang disempurnakan dengan PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) mewajibkan Pemerintah pada setiap level baik pusat maupun daerah untuk menyusun laporan keuangan. Laporan Keuangan ini kemudian akan diperiksa oleh auditor eksternal pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara berkala. Penyusunan dan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah merupakan langkah untuk mewujudkan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan pemerintah (Mustikarini, 2009) Laporan keuangan menjadi alat yang digunakan untuk menunjukkan capaian kinerja dan pelaksanaan fungsi pertanggung jawaban dalam suatu entitas (Choiriyah, 2010). Oleh karena itu, pengungkapan informasi dalam laporan keuangan harus memadai agar dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan sehingga menghasilkan keputusan yang cermat dan tepat (Sumarjo, 2010).

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk

menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi anggaran terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Untuk memenuhi tujuan umum laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal: Aset, Kewajiban, Ekuitas dana,

Pendapatan, Belanja, Transfer, Pembiayaan, Arus kas.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan laporan keuangan pemerintah, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non-keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam penyampaian informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri atas:

1. Neraca
2. Laporan arus kas
3. Laporan perubahan saldo anggaran lebih
4. Laporan perubahan ekuitas
5. Laporan operasional
6. Laporan realisasi anggaran
7. Catatan laporan keuangan

Menurut Bastian (2009) laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila memenuhi:

- a. Relevan, agar bermanfaat informasi laporan keuangan harus sesuai untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dan membantu mereka

mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu.

Relevan memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1) Manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

2) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

3) Tepat waktu (*timelines*)

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

4) Lengkap

Informasi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada.

- b. Andal (*reliable*), informasi memiliki kualitas andal jika informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan laporan keuangan secara jujur (*Faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar. serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal

memenuhi karakteristik berikut:

1) Penyajian jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta pengertian lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

2) Dapat diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan harus dapat diuji, dan jika dilakukan pengujian lebih dari sekali oleh pihak, maka hasilnya tetap menunjukkan kesimpulan yang tidak berbeda jauh.

3) Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

c. Dapat Dibandingkan

Pengguna laporan keuangan harus dapat membandingkan laporan keuangan organisasi antar periode untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kecenderungan (*trend*) perubahan posisi dan kinerja keuangan secara relatif. Informasi yang terdapat pada laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan pada entitas lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan eksternal dapat dilakukan bila entitas yang dibandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan

menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut di jelaskan pada periode terjadinya perubahan.

d. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna. Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.

3. Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah

Pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah proses pengawasan secara terus menerus dan pelaporan capaian kegiatan, khususnya kemajuan atas tujuan yang direncanakan (Mustikarini, 2009). Perhatian yang besar terhadap pengukuran kinerja disebabkan oleh opini bahwa pengukuran kinerja dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, penghematan dan produktifitas pada organisasi sektor publik (Mustikarini, 2009).

Pengukuran kinerja ini dimaksudkan untuk mengetahui capaian kinerja yang telah dilakukan organisasi dan sebagai alat untuk pengawasan serta evaluasi organisasi. Pengukuran kinerja akan memberikan umpan balik sehingga terjadi upaya perbaikan yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan di masa mendatang. Keputusan menteri dalam negeri republik indonesia no 120 – 4761 tahun 2014 tentang penetapan peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional

tahun 2013 menteri dalam negeri republik indonesia, yang menimbang bahwa, untuk melaksanakan ketentuan pasal 27 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu menetapkan keputusan menteri dalam negeri republik indonesia tentang penetapan peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional tahun 2013.

Pemerintah daerah diwajibkan menyampaikan laporan yang digunakan sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. EPPD dilakukan dengan sumber utama LPPD yang memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran (PP No. 6 tahun 2008). Tujuan utama dilaksakannya evaluasi adalah untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. EPPD meliputi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD), Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi daerah (EKPOD), dan Evaluasi Daerah Otonom Baru (EDOB).

4. Karakteristik Pemerintah Daerah

a. Ukuran Pemerintah (*Size*) Daerah

Size adalah suatu nominal yang dapat mendiskripsikan sesuatu. Suatu pemerintah daerah yang berukuran besar memiliki jumlah dan transfer kekayaan yang besar pula, sehingga pemerintah daerah akan

mendapatkan pengawasan yang lebih besar. Pemerintah daerah yang besar juga lebih kompleks dalam pengelolaan keuangannya, sehingga semakin banyak informasi keuangan yang harus dilaporkan untuk mengurangi terjadinya asimetri informasi.

Pemerintah daerah yang memiliki ukuran atau memiliki aset yang lebih besar akan memiliki tekanan yang besar pula dari publik untuk menyajikan laporan keuangannya sebagai upaya meningkatkan transparansi dan mengurangi asimetri informasi. Penelitian yang dilakukan oleh Widya Astuti (2009), Yayuk Harumiyati (2012), dan Galang (2010) menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah. Sebagai informasi bahwa *size* perusahaan yang diukur dengan menggunakan total aktiva akan lebih baik karena nilai aktiva relatif stabil dibandingkan dengan nilai penjualan dan kapitalisasi pasar dalam mengukur *size* perusahaan (Nasser, 2009).

b. Tingkat Kekayaan Daerah

Kekayaan (*wealth*) pemerintah daerah dapat dinyatakan dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Sumarjo, 2010). Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang

sah. (Undang-Undang No.33 Tahun 2004).

Kekayaan adalah kemampuan dalam mencukupi kebutuhan. Kekayaan suatu negara dapat diukur dengan berbagai macam ukuran yang tidak selalu sama karena setiap orang memiliki pandangan hidup yang berbeda sehingga tolok ukur dari kesejahteraan juga akan berbeda. Mustikarini (2012) menyatakan, salah satu sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD yang tinggi dimiliki oleh pemerintah daerah akan memudahkan kinerja atas transaksi pengeluaran atau belanja daerah sebagai kebutuhan Pemda. Tingkat kekayaan daerah ini diprosikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan total pendapatan. Menurut Indrarti (2011) berdasarkan pasal 1 UU No. 33 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli daerah (PAD). Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. PAD memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan.

**c. Tingkat ketergantungan dengan pemerintah pusat
(*Intergovernmental Revenue*)**

Dengan desentralisasi fiskal terjadi aliran dana yang cukup besar dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (Syahrudin, 2009). Pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintahnya. Idealnya desentralisasi fiskal dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah. Kondisi ini terbukti pada beberapa daerah dimana desentralisasi fiskal meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan kualitas pelayanan public. Menurut Mustikarini (2009) *intergovernmental revenue* adalah jenis pendapatan Pemerintah Daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai operasi pemerintah daerah. Untuk mengetahui tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dapat diukur dengan besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) dibandingkan dengan total pendapatan. (Mustikarini dan Fitria, 2012)

d. Belanja Modal

Menurut Halim (2014) belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menimbulkan konsekuensi menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan,

bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoretis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lain, dan membeli.

Namun, untuk kasus di pemerintahan, biasanya cara yang dilakukan adalah dengan cara membeli. Proses pembelian yang dilakukan umumnya dilakukan melalui sebuah proses lelang atau tender yang cukup rumit. Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintahan daerah, sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara financial (Abdullah : 2009).

5. Temuan Audit BPK

Keyakinan publik pada keandalan laporan keuangan yang dihasilkan secara internal bergantung secara langsung pada validasi oleh auditor ahli yang independen. Audit adalah proses pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya pelaksanaan ditetapkan.

Berdasarkan Undang-Undang No.15 tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pemeriksaan keuangan negara dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan BPK tersebut berupa opini, temuan, kesimpulan atau dalam bentuk rekomendasi. Dalam penelitian ini hasil pemeriksaan oleh BPK yang digunakan hanya Temuan Audit yang dapat dinilai dengan rupiah yang dapat menimbulkan kerugian dari adanya temuan audit. Temuan audit BPK merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK terhadap laporan keuangan Pemda atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya

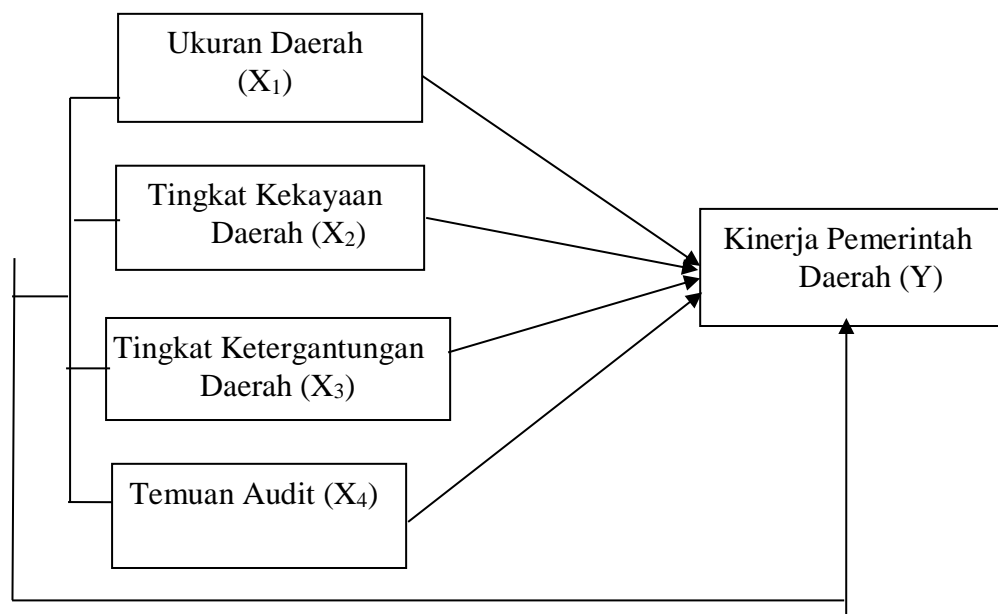
No	Peneliti	Judul	Variabel X	Variabel Y	Model Analisis	Hasil Penelitian
1	Widya Astuti (2009)	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Di Indonesia Tahun Anggaran 2007	1) Ukuran daerah 2) Tingkat Kekayaan Daerah 3) Tingkat Ketergantungan Kepada Pusat 4) Belanja Daerah 5) Temuan Audit	Kinerja Pemerintah Daerah	Kuantitatif	Tingkat kekayaan, Ukuran Daerah, tingkat Ketergantungan daerah terhadap total pendapatan Pemda berpengaruh positif signifikan terhadap skor kinerja

						sedangkan temuan audit berpengaruh negative terhadap kinerja pemerintah daerah.
2	Yayuk Harumiati (2012)	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun Anggaran 2011	1) Ukuran daerah 2) Tingkat Kekayaan Daerah 3) Tingkat Ketergantungan Kepada Pusat 4) Belanja Daerah 5) Temuan Audit	Kinerja Pemerintah Daerah	Kuantitatif	Tingkat kekayaan, Ukuran Daerah, tingkat Ketergantungan daerah terhadap total pendapatan Pemda berpengaruh positif signifikan terhadap skor kinerja sedangkan temuan audit berpengaruh negatife terhadap kinerja,
3	Galang Afrian (2016)	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit (Bpk) Dan <i>Leverage</i> Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau)	1) Ukuran daerah 2) Tingkat Kekayaan Daerah 3) Tingkat Ketergantungan Kepada Pusat 4) Belanja Daerah 5) <i>Leverage</i>	Kinerja Pemerintah Daerah	Kuantitatif	Ukuran Daerah Tingkat kekayaan, tingkat Ketergantungan daerah dan <i>Leverage</i> terhadap total pendapatan Pemda berpengaruh positif signifikan terhadap skor kinerja
4	Ponco Susilawati (2016) Peneliti	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Di Indonesia (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah) Judul	1) Ukuran daerah 2) Tingkat Kekayaan Daerah 3) Tingkat Ketergantungan Kepada Pusat 4) Belanja Daerah Temuan Audit Variabel X	Kinerja Pemerintah Daerah Variabel Y	Kuantitatif Model Analisis	Ukuran Daerah Tingkat kekayaan, tingkat Ketergantungan daerah dan <i>Leverage</i> terhadap total pendapatan Pemda berpengaruh positif signifikan Hasil Penelitian
5	Veriza Nanda (2017)	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Studi Kasus Di Kabupaten/Kota Se-Sumatera Tahun Anggaran 2013-2014)	1) Ukuran daerah 2) Tingkat Kekayaan Daerah 3) Tingkat Ketergantungan Kepada Pusat 4) Belanja Daerah Temuan	Kinerja Pemerintah Daerah	Kuantitatif	Ukuran Daerah Tingkat kekayaan, tingkat Ketergantungan daerah dan <i>Leverage</i> terhadap total pendapatan Pemda berpengaruh positif signifikan terhadap skor kinerja

Sumber : Penulis, (2019)

C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Widya Astuti (2009) menyatakan bahwa Ukuran Daerah, tingkat Ketergantungan daerah terhadap total pendapatan Pemda berpengaruh positif signifikan terhadap skor kinerja sedangkan temuan audit berpengaruh negative terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan desentralisasi fiskal terjadi aliran dana yang cukup besar dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (Syahrudin, 2009). Kondisi ini terbukti pada beberapa daerah dimana desentralisasi fiskal meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan kualitas pelayanan public. Pemeriksaan keuangan negara dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dengan adanya temuan audit oleh BPK mengindikasikan telah terjadi suatu praktik yang merugikan pemerintah daerah yang dapat berdampak pada menurunnya kinerja pemerintahan tersebut.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Menurut Manullang dan Pakpahan (2014:761), mengemukakan bahwa hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara dari pertanyaan yang ada pada perumusan masalah penelitian. Berdasarkan definisi tersebut dikatakan bahwa hipotesis adalah jawaban sementara yang dianggap benar agar dapat ditarik suatu kesimpulan yang logis. Oleh karena itu, penulis merumuskan hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

1. Ukuran daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Tingkat kekayaan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
3. Tingkat ketergantungan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
4. Temuan audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
5. Ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan daerah dengan pusat dan temuan audit berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antar dua variabel atau lebih dengan penelitian ini maka akan dibangun suatu teori yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala Rusiadi (2013:14).

Pendapat lain menyatakan bahwa penelitian yang bersifat kuantitatif yaitu asosiatif kausalitas yang bertujuan untuk mengetahui derajat hubungan dan pola bentuk pengaruh antar variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen). Analisis data kuantitatif digunakan pada saat peneliti menggunakan pendekatan penelitian survey, penelitian eksperimen, penelitian kuantitatif dan beberapa penelitian lainnya yang mengandung data - data berupa angka - angka Manullang dan Pakpahan (2014 : 17).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian : Penelitian dilakukan di Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara periode 2015-2018.
2. Waktu penelitian : Peneliti mulai melakukan penelitian ini dari bulan Maret 2019 - Agustus 2019.

Tabel 3.1
Skedul proses penelitian

No	jenis kegiatan	2019																												
		Maret				April				juni				Juli				september				oktober								
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
1	Riset awal pengajuan judul	■	■	■	■																									
2	Penyusunan proposal		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3	Seminar																													
4	Perbaikan ACC proposal																													
5	Pengolahan data																													
6	Penyusunan skripsi																													
7	Bimbingan skripsi																													
8	Meja Hijau																													

Sumber : Diolah oleh penulis 2019

C. Populasi dan Sample

1. Populasi

Dalam penelitian ini dibutuhkan objek penelitian sebagai sumber informasi pada penelitian ini. Populasi menurut Marihot dan Manuntun (2014 : 137) populasi penelitian merupakan seluruh elemen/unsur yang akan diamati dan diteliti. Tujuannya yaitu untuk dapat menentukan besarnya anggota sampel yang akan diambil dari populasinya. Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten atau kota pemerintah daerah Sumatera Utara yang berjumlah 33.

2. Sampel

Peneliti menetapkan beberapa sampel yang digunakan dalam menentukan objek penelitian adapun sampel yang digunakan adalah data kuantitatif yaitu data yang diukur dalam suatu skala numerik. Penelitian ini

menggunakan sampel jenuh dalam penarikan sampelnya karena jumlah sampel yang dibawah dari 100 sehingga semua populasi ditarik dan dijadikan sampel (Rusiadi, 2014). Sehingga disimpulkan bahwasannya jumlah sampel pada penelitian ini adalah 33 kabupaten atau kota pemerintah daerah Sumatera Utara pada tahun 2016.

D. Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional

1. Variabel Penelitian

Pada penelitian ini ditetapkan beberapa variable yang akan dianalisis venomena masalah yang terkait. Variabel penelitian pada dasarnya segala sesuatu yang berbentuk apa saja dan memiliki nilai serta variasi yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. (Rusiadi:2013:50). Hadi dalam (Rusiadi:2013:50) menyatakan bahwa variabel merupakan semua keadaan, faktor, kondisi, perlakuan, atau tindakan yang dapat mempengaruhi hasil eksperimen. Bernad dalam (Manullang, M dan Pakpahan, 2014:35) menyatakan bahwa variabel merupakan suatu sifat-sifat yang dipelajari, suatu simbol, atau lambang yang padanya melekat bilangan atau nilai, dapat dibedakan, memiliki variasi nilai atau perbedaan nilai.

Dalam penelitian ini variabel dependen adalah kinerja pemerintah daerah provinsi Sumatera Utara, dan untuk variabel independennya adalah ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan kepada pusat, dan temuan audit.

2. Defenisi operasional

Definisi operasional merupakan penjabaran akan definisi variabel dan indikator pada penelitian/ Selanjutnya definisi operasional menggambarkan pula pengukuran atas variabel dan indikator yang dikembangkan pada penelitian. Defenisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi tentang bagaimana caranya mengukur variabel. Definisi operasional adalah penjelasan tentang batasan atau ruang lingkup variabel penelitian, sehingga memudahkan pengukuran dan pengamatan serta pengembangan intrumen/alat ukur. (Rusiadi:2013:88).

Oleh karena itu, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang variabel penelitian, maka disajikan tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2
Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional

No	Variabel	Defenisi	Pengukuran	Skala
1	Dependen (Y) Kinerja Pemerintah Daerah	Kinerja Pemerintah Daerah merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan, visi dan misi suatu organisasi (Bastian, 2009:117).	$\frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Alokasi Anggaran}}$	Rasio
2	Independen (X1) Ukuran Daerah	Ukuran daerah merupakan jumlah PAD dan DAU merupakan sumber pendapatan daerah yang memiliki peran utama dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka mencapai tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah yang ingin meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah (Mardiasmo 2001).	logaritma natural (Ln) Total (PAD + DAU + DAK+DL)	Rasio

3	Independen (X2) Tingkat Kekayaan Daerah	Tingkat kekayaan daerah daerah menggambarkan jumlah atau tingkat kemandirian pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah (Mustikarini dan Fitriasaki 2012).	$\frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan}}$	Rasio
4	Independen (X3) Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah	Menurut Patrick (2009) <i>intergovernmental revenue</i> adalah jenis pendapatan Pemerintah Daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai operasi pemerintah daerah. Untuk mengetahui tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dapat diukur dengan besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) dibandingkan dengan total pendapatan. (Mustikarini dan Fitria, 2012)	$\frac{\text{DAU} + \text{DAK} + \text{DL}}{\text{Total Pendapatan}}$	Rasio
5	Independen (X4) Temuan Audit	Temuan audit BPK merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK dalam laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap peraturan-peraturan tentang sistem pengendalian intern maupun tingkat kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan timbulnya kerugian daerah (Yayuk Harumiyati, 2009)	$\frac{\text{Temuan Audit}}{\text{Laporan Anggaran}}$	Rasio

Sumber : Diolah penulis 2019

E. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumen yang diambil dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) kab/kota Tahun 2018 yang diakses melalui situs www.djpk.kemenkeu.go.id. Data mengenai status daerah diperoleh dari Dirjen Otda Kemendagri, dan data temuan audit BPK dapat diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Tahun Anggaran 2018 yang dilaporkan dalam Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan (ILHP) semester I dan semester II Tahun 20, yang diakses melalui situs www.bpk.go.id. Data skor kinerja penyelenggara pemda kabupaten/kota diperoleh dari hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah (EKPPD) untuk LPPD tahun anggaran 2018 yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 120-257 Tahun 2014 tentang penetapan peringkat dan status kinerja penyelenggara pemerintah daerah secara nasional, dan diakses melalui situs www.kemendagri.go.id.

F. Teknik Analisis Data

1. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk mengetahui bagaimana gambaran umum dari semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini, dengan cara melihat tabel statistik

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ini digunakan untuk mengetahui apakah model yang digunakan dalam regresi benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan. Terdapat empat tahap, yaitu :

a. Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan sebelum data diolah berdasarkan model-model penelitian yang diajukan. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2009). Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Ada dua cara untuk mengetahui residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan cara uji grafik, dan uji statistik. Pada uji grafik dapat dikatakan normal apabila dalam *probability plot* ada penyebaran titik-titik disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal tersebut. Setelah uji grafik, dilanjutkan dengan uji statistik, yaitu *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Pedoman yang digunakan dalam pengambilan kesimpulan adalah sebagai berikut :

- 1) Apabila $p < 0,50$ maka data tidak terdistribusi secara normal.
- 2) Apabila $p > 0,50$ maka data terdistribusi secara normal.

(Ghozali, 2009).

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka

dinamakan terdapat masalah multikolinearitas. Sedangkan untuk mengetahui gejala tersebut dapat dideteksi dari besarnya VIF (*Variance Inflation Factor*) melalui program SPSS. (Rusiadi:2013:154)

Uji multikolinearitas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel bebas yang memiliki kemiripan antar variabel bebas dalam suatu model. Kemiripan antar variabel bebas akan mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. Selain itu, uji ini dilakukan untuk menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.

Ketentuan untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas yaitu:

$VIF > 10$ artinya mempunyai persoalan multikolinearitas

$VIF < 10$ artinya tidak terdapat multikolinearitas

Tolerance value < 0.1 , artinya mempunyai persoalan multikolinearitas

Tolerance value > 0.1 , artinya tidak terdapat multikolinearitas

(Rusiadi:2013:154) dan (Sugiyono:2016:231)

Nilai *tolerance* dapat dicari dengan rumus:

$$Tolerance = (1 - R_j^2)$$

Dimana R_j^2 = nilai determinasi dari regresi.

Sedangkan nilai VIF dapat dicari dengan rumus:

$$VIF = \frac{1}{Tolerance}$$

$$VIF = \left(\frac{1}{Tolerance} \right)$$

c. Uji Autokorelasi

Digunakan untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode t dengan periode sebelumnya ($t-1$). Model regresi dikatakan baik apabila bebas dari autokorelasi. Jika terjadi autokorelasi maka dapat dikatakan koefisien korelasi yang diperoleh kurang akurat. Cara mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi yaitu dengan uji DW yang menggunakan tabel statistik dari *Durbin-Waston* (DW). Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi (Ghozali, 2009) Kriteria penilaian dengan Durbin Waston adalah sebagai berikut :

- 1) Nilai D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
- 2) Nilai D-W diantara -2 sampai 2 berarti tidak ada autokorelasi.
- 3) Nilai D-W di atas 2 berarti ada autokorelasi negatif.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan yaitu model yang terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2009).

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas dalam mempengaruhi variabel tidak bebas secara bersama-sama ataupun secara parsial. Pada penelitian ini, data diolah menggunakan *software* komputer yaitu SPSS (*Statistical Package for Social Science*) versi 16,0 (Ghozali, 2009). Maka model yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + e$$

Keterangan :

Y = Kinerja

a = Konstanta

β_1 ...3 = Koefisien Regresi

X1 = Ukuran Pemerintah Daerah

X2 = Tingkat Kekayaan Daerah

X3 = Tingkat Ketergantungan Daerah

B4 = Koefisien regresi, yaitu besarnya perubahan Y apabila X4 berubah sebesar 1 satuan

X4 = Laporan Hasil Audit

e = Standar error

Uji interaksi atau sering disebut dengan *Moderated Regression Analysis* (MRA) merupakan aplikasi khusus regresi berganda linear dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen) (Ghozali, 2009).

4. Pengujian Hipotesis

a. Uji Statistik t

Uji t dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya suatu variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen secara parsial. Probabilitas atau signifikansi dalam penelitian ini adalah 5%. (Gozhali dalam Rusiadi, 2014) Hipotesis yang akan diuji adalah :

1. $H_0 : \beta_1 = 0$, maka variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
2. $H_0 : \beta_1 > 0$, maka variabel independen mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap variabel dependen.
3. $H_a : \beta_1 < 0$, maka variabel independen mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap variabel dependen.

Pengujian hipotesis ini menggunakan uji t dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :

1. Apabila dalam penelitian ini probabilitas (α) $> 0,05$ maka H_0 diterima, berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Apabila dalam penelitian ini probabilitas (α) $< 0,05$ maka H_0 ditolak, berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

b. Uji Statistik F

Menurut Ghozali (2012: 98) pada dasarnya uji F menunjukkan arah apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam

model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji F digunakan untuk menguji signifikansi koefisien regresi secara keseluruhan dan pengaruh variabel bebas secara bersama-sama. menurut Sugiyono (2014:152) pengujian dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa cara sebagai berikut :

1. Apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_a ditolak dan H_o diterima artinya tidak ada pengaruh antara variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat.
2. Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_a diterima dan H_o ditolak artinya ada pengaruh antara variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat.

Uji F dilakukan hanya dengan melihat nilai signifikansi F yang terdapat pada output hasil analisis regresi yang menggunakan SPSS versi 16.0. Jika angka signifikansi F lebih kecil dari α (0,05) maka dapat dikatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar hubungan dari beberapa variabel dalam pengertian yang lebih jelas. (Sugiyono, 2016:284)

Koefisien determinasi akan menjelaskan seberapa besar perubahan atau variasi suatu variabel bisa dijelaskan oleh perubahan atau variasi pada variabel yang lain. Dalam bahasa sehari-hari adalah kemampuan variabel

bebas untuk berkontribusi terhadap variabel terikatnya dalam satuan persentase. Nilai koefisien ini antara 0 dan 1. Jika hasil lebih mendekati angka 0 berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel amat terbatas. Tapi jika hasil mendekati angka 1 berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat.

Cara menghitung koefisien determinasi yaitu: (Sugiyono, 2016:289)

$$r^2 = (r_{xy})^2$$

Dimana :

r^2 = Koefisien Determinan

r_{xy} = Koefisien Korelasi *Product Moment*

Di mana rumus untuk mencari Koefisien korelasi product Moment sebagai berikut: (Sugiyono, 2016:285)

$$r_{xy} = \frac{\sum xy}{\sqrt{(\sum x^2)(\sum y^2)}}$$

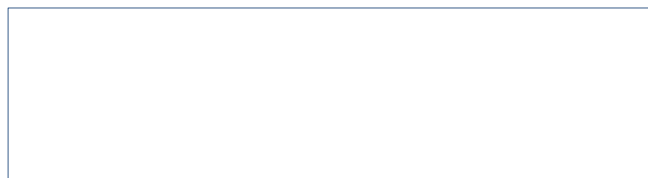
Keterangan:

r_{xy} = Koefisien Korelasi product moment

x = Variabel bebas

y = Variabel tetap

Koefisien korelasi antara variabel X_1 dengan Y dan X_2 dengan Y dapat dicari dengan menggunakan rumus korelasi Carl Pearson: (Sugiyono, 2016:286)



$$r_{xy} = \frac{n \sum x_i y_i - (\sum x_i) (\sum y_i)}{\sqrt{\{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2\} \{n \sum y_i^2 - (\sum y_i)^2\}}}$$

Keterangan:

r_{xy} = Koefisien korelasi product moment

n = Jumlah sampel

x = Skor variabel x

y = Skor variabel y

$\sum x$ = Jumlah skor variabel x

$\sum y$ = Jumlah skor variabel y

$\sum x^2$ = Jumlah kuadrat skor variabel x

$\sum y^2$ = Jumlah kuadrat skor variabel y

Untuk mencari hubungan kedua variabel bebas (X_1, X_2) dengan variabel terikat Y dapat dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi ganda ($R_{x_1 x_2 y}$).

(Sugiyono, 2016:287)

$$R_{x_1 x_2 y} = \sqrt{\frac{r_{x_1 y}^2 + r_{x_2 y}^2 - 2(r_{x_1 y})(r_{x_2 y})(r_{x_1 x_2})}{1 - r_{x_1 x_2}^2}}$$

Keterangan:

$R_{x_1 x_2 y}$ = Koefisien korelasi ganda antar variabel X_1 dan X_2 secara bersama-sama dengan variabel Y

$r_{x_1 y}$ = Koefisien korelasi X_1 terhadap Y

r_{x_2y} = Koefisien korelasi X_2 terhadap Y

$r_{x_1x_2}$ = Koefisien korelasi X_1 terhadap X_2

Kuatnya hubungan antar variabel dinyatakan dalam koefisien korelasi. Koefisien korelasi positif terbesar = 1 dan koefisien korelasi negatif terbesar = -1, sedangkan yang terkecil adalah 0. Bila hubungan antara dua variabel atau lebih itu memiliki koefisien korelasi -1 atau -1 , maka hubungan tersebut sempurna. Jika terdapat $r = -1$ maka terdapat korelasi negatif sempurna, artinya setiap peningkatan pada variabel tertentu maka terjadi penurunan pada variabel lainnya. Sebaliknya jika didapat $r = 1$, maka diperoleh korelasi positif sempurna, artinya ada hubungan yang positif antara variabel, dan kuat atau tidaknya hubungan ditunjukkan oleh besarnya nilai koefisien korelasi, dan koefisien korelasi adalah 0 maka tidak terdapat hubungan.

Untuk dapat memberikan interpretasi terhadap kuatnya hubungan x terhadap y , maka dapat digunakan pedoman tabel berikut:

Tabel 3.4. Pedoman untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber : (Sugiyono, 2016:287)

Untuk mengetahui apakah koefisien korelasi hasil perhitungan signifikan atau tidak, maka perlu dibandingkan dengan r_{tabel} product moment dengan taraf signifikan 0.05 (taraf kepercayaan 95%).

Kaidah pengujian signifikan : (Sugiyono, 2016:289)

1. Jika $r_{\text{hitung}} \geq r_{\text{tabel}}$. Maka tolak H_0 artinya ada hubungan yang signifikan.
2. Jika $r_{\text{hitung}} < r_{\text{tabel}}$. Maka terima H_0 artinya tidak ada hubungan yang signifikan.

Untuk mengetahui kontribusi variabel X terhadap Y, dapat dicari dengan menggunakan rumus koefisien determinasi. Adapun rumus koefisien determinasi sebagai berikut:

$$D = r^2 \times 100\%$$

Keterangan

D = Nilai Koefisien determinasi

R^2 = Koefisien korelasi yang dikuadratkan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Instansi Pemerintahan Sumatera Utara

a. Sejarah Ringkas

Pada zaman pemerintahan Belanda, Sumatera Utara merupakan suatu pemerintahan yang bernama Gouvernement van Sumatra dengan wilayah meliputi seluruh pulau Sumatera, dipimpin oleh seorang Gubernur yang berkedudukan di kota Medan. Setelah kemerdekaan, dalam sidang pertama Komite Nasional Daerah (KND), Provinsi Sumatera kemudian dibagi menjadi tiga sub provinsi yaitu: Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan.

Provinsi Sumatera Utara sendiri merupakan penggabungan dari tiga daerah administratif yang disebut keresidenan yaitu: Keresidenan Aceh, Keresidenan Sumatera Timur, dan Keresidenan Tapanuli. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia (R.I.) No. 10 Tahun 1948 pada tanggal 15 April 1948, ditetapkan bahwa Sumatera dibagi menjadi tiga provinsi yang masing-masing berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yaitu: Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Tengah, dan Provinsi Sumatera Selatan. Tanggal 15 April 1948 selanjutnya ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Sumatera Utara.

Pada awal tahun 1949, dilakukan kembali reorganisasi pemerintahan di Sumatera. Dengan Keputusan Pemerintah Darurat R.I. Nomor

22/Pem/PDRI pada tanggal 17 Mei 1949, jabatan Gubernur Sumatera Utara ditiadakan. Selanjutnya dengan Ketetapan Pemerintah Darurat R.I. pada tanggal 17 Desember 1949, dibentuk Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli/Sumatera Timur. Kemudian, dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1950 pada tanggal 14 Agustus 1950, ketetapan tersebut dicabut dan dibentuk kembali Provinsi Sumatera Utara. Dengan Undang-Undang R.I. No. 24 Tahun 1956 yang diundangkan pada tanggal 7 Desember 1956, dibentuk Daerah Otonom Provinsi Aceh, sehingga wilayah Provinsi Sumatera Utara sebahagian menjadi wilayah Provinsi Aceh.

b. Visi dan Misi Provinsi Sumatera Utara 2018-2023

1) Visi

Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan Bermartabat

2) Misi

- a) Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.
- b) Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika,

masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.

- c) Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.
- d) Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.
- e) Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab

c. Prioritas Pembangunan Sumatera Utara

- 1) Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan.
- 2) Peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan.
- 3) Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan.
- 4) Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas.
- 5) Peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan pariwisata

d. Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara

Tabel 4.1 Daftar Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara

No	Kabupaten/Kota	No	Kabupaten/Kota
1	Kabupaten Nias	18	Kabupaten Serdang Berdagai
2	Kabupaten Mandailing Natal	19	Kabupaten Batu bara
3	Kabupaten Tapanuli Selatan	20	Kabupaten Padang lawas utara
4	Kabupaten Tapanuli Tengah	21	Kabupaten Padang lawas
5	Kabupaten Tapanuli Utara	22	Kabupaten Labuhan Batu Selatan
6	Kabupaten Toba Samosir	23	Kabupaten Labuhan Batu Utara
7	Kabupaten Labuhan Batu	24	Kabupaten Nias Utara
8	Kabupaten Asahan	No	Kabupaten/Kota
9	Kabupaten Simalungun		
10	Kabupaten Dairi	25	Kabupaten Nias Barat
11	Kabupaten Karo	26	Kabupaten Sibolga
12	Kabupaten Deli Serdang	27	Kota Tanjung Balai
13	Kabupaten Langkat	28	Kota Pematang Siantar
14	Kabupaten Nias Selatan	29	Kota Tebing Tinggi
15	Kabupaten Humbang Hasundutan	30	Kota Binjai
16	Kabupaten PakPak Barat	31	Kota Medan
17	Kabupaten Samosir	32	Kota Padang Sidempuan
		33	Kota Gunung sitoli

Sumber : <http://www.sumutprov.go.id>

2. Analisis Deskriptif

Tabel 4.2 Data Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Ukuran Daerah	33	20.050	22.180	2.07767E1	.498192
Tingkat Kekayaan Daerah	33	.022	.356	.07763	.063555

Ketergantungan Daerah	33	.441	.977	.77150	.090000
Temuan Audit	33	.002	1.337	.24307	.306935
Kinerja	33	.788	.993	.88690	.043563
Valid N (listwise)	33				

Sumber : www.idx.co.id (Olah Data Laporan Keuangan periode 2014-2017)

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui data deskriptif ukuran Daerah (UD), Tingkat Kekayaan Daerah (TKD), Ketergantungan Daerah (KD), Temuan Audit (TA) dan Kinerja Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Jumlah N (sampel) pada penelitian ini adalah 33.

Nilai minimum untuk variabel Ukuran Daerah yaitu 20,05 yang merupakan Ukuran Daerah Kabupaten Pakpak Barat hal ini menggambarkan bahwasannya ukuran daerah atau jumlah pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan daerah Kabupaten Pakpak Barat masih dinilai rendah bila dibandingkan dengan kabupaten atau kota lainnya yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Nilai maksimum untuk variabel Ukuran Daerah yaitu 22,18 yang merupakan Ukuran Daerah Kota Medan, hal ini menggambarkan bahwasannya kota Medan memiliki sumber pendapatan yang paling besar baik dari pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan dari pusat bila dibandingkan dengan kabupaten atau kota lainnya yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini menjadikan modal besar bagi Kota Medan untuk melakukan pembangunan di kota Medan.

Nilai minimum untuk variabel Tingkat Kekayaan Daerah yaitu 0,02 yang merupakan Tingkat Kekayaan Daerah Kabupaten Nias Selatan hal ini menggambarkan bahwasannya pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak, retribusi dan pendapatan asli lainnya yang ada di Daerah Kabupaten

Nias Selatan masih dinilai rendah bila dibandingkan dengan kabupaten atau kota lainnya yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Nilai maksimum untuk variabel tingkat Kekayaan Daerah yaitu 0,356 yang merupakan tingkat Kekayaan Daerah Kota Medan, hal ini menggambarkan bahwasannya kota Medan memiliki sumber pendapatan yang paling besar dari pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak maupun retribusi bila dibandingkan dengan kabupaten atau kota lainnya yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini menjadikan modal besar bagi Kota Medan untuk melakukan pembangunan di kota Medan.

Nilai minimum untuk variabel Ketergantungan Daerah yaitu 0,441 yang merupakan Daerah Kota Medan hal ini menggambarkan bahwasannya kota Medan adalah kota yang paling mandiri dari kota lainnya yang ada di Provinsi Sumatera Utara hal ini disebabkan karena ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pusat yang rendah. Nilai maksimum untuk variabel tingkat Ketergantungan Daerah yaitu 0,977 yang merupakan Daerah Kabupaten Nias Selatan, hal ini menggambarkan bahwasannya Kabupaten Selatan Nias memiliki sumber pendapatan yang kecil bila dibandingkan dengan kabupaten atau kota lainnya yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini menjadikan Kabupaten Nias Selatan belum mandiri dan masih membutuhkan dana perimbangan dari pusat untuk melakukan kegiatan pembangunan di kabupaten tersebut.

Nilai minimum untuk variabel Temuan Audit yaitu 0,002 yang merupakan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai hal ini menggambarkan bahwasannya Daerah Kabupaten Serdang Bedagai adalah kota yang tata

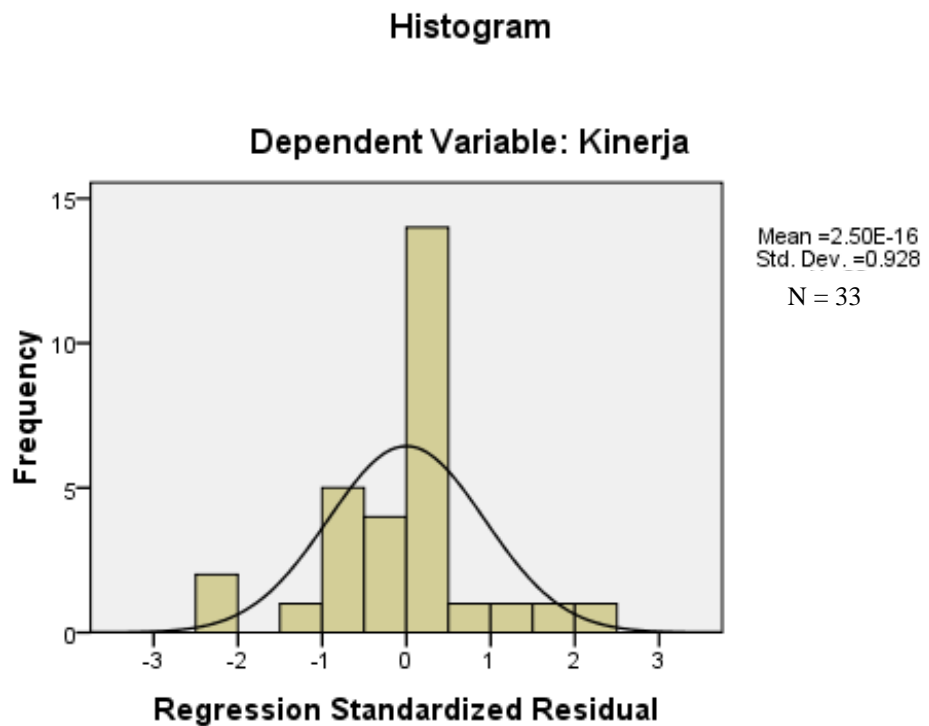
kelola pemerintahannya sudah lumayan membaik sesuai undang –undang yang berlaku bila dibandingkan dari kota lainnya yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Nilai maksimum untuk variabel tingkat Temuan Audit yaitu 1,337 yang merupakan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara, hal ini menggambarkan bahwasannya Kabupaten Labuhan Batu Utara memiliki permasalahan dalam hal tata kelola keuangan yang berpotensi merugikan pemerintah daerah tersebut.

Nilai minimum untuk variabel Kinerja Pemerintah Daerah yaitu 0,788 yang merupakan Daerah Kota Medan hal ini menggambarkan bahwasannya kota Medan adalah kota yang relaisasi anggaran paling rendah dari kota lainnya yang ada di Provinsi Sumatera Utara hal ini disebabkan karena program pemerintah daerah belum dilaksanakan dengan baik dan sesuai perencanaan sehingga berdampak pada pembangunan daerah yang belum maksimal dan sesuai perencanaan. Nilai maksimum untuk variabel Kinerja Pemerintah Daerah yaitu 0,993 yang merupakan Daerah Kabupaten Humbang Hasuduntan, hal ini menggambarkan bahwasannya Kabupaten tersebut dapat merealisasikan perenanaan pembangunan sesuai dengan program pemerintah daerah dalam rangka proses pembangunan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini menggambarkan bahwasannya ada suatu komitmen pemerintah daerah yang bekerja dengan serius sesuai dengan program perencanaan sehingga relisasi anggaran menjadi tinggi. Perhatian yang besar terhadap pengukuran kinerja disebabkan oleh opini bahwa pengukuran kinerja dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, penghematan dan produktifitas pada organisasi sektor publik (Mustikarini, 2009).

Pengukuran kinerja ini dimaksudkan untuk mengetahui capaian kinerja yang telah dilakukan organisasi dan sebagai alat untuk pengawasan serta evaluasi organisasi. Pengukuran kinerja akan memberikan umpan balik sehingga terjadi upaya perbaikan yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan di masa mendatang.

2. Pengujian Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas data

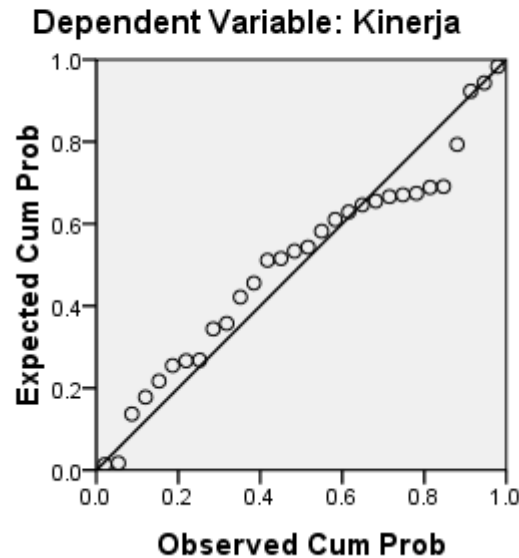


Gambar 4.1 Histogram Uji Normalitas

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Berdasarkan Gambar 4.1 di atas, hasil pengujian normalitas data diketahui bahwa data telah berdistribusi secara normal, dimana gambar histogram memiliki garis membentuk lonceng dan memiliki kecembungan seimbang ditengah.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 4.2 PP Plot Uji Normalitas

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Berdasarkan Gambar 4.2 di atas, kemudian untuk hasil pengujian normalitas data dengan menggunakan gambar PP Plot terlihat titik-titik data untuk variabel struktur modal, piutang dan profitabilitas yang menyebar berada di sekitar garis diagonal sehingga data telah berdistribusi secara normal.

Dari kedua gambar di atas, maka dapat disimpulkan bahwa setelah dilakukan uji normalitas data, data untuk variabel struktur modal, piutang dan profitabilitas berdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent*). Uji ini dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF) dari hasil analisis dengan menggunakan SPSS. Apabila nilai *tolerance value* $> 0,10$ atau $VIF < 10$ maka disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Multikolinieritas dari hasil data yang telah didistribusikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Uji Multikolinieritas

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	Tolerance	Vif
(Constant)	.320	.024	.528		
Ukuran Daerah	.225	.005	.537	0,356	2,807
Tingkat Kekayaan Daerah	.124	.004	.588	0,426	2,347
Ketertgantungan Daerah	.157	.009	.597	0,247	4.052
Temuan Audit	.320	.024	.528	0,861	1,162

a. Dependent Variable: Kinerja

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa angka *Variance Inflation Factor* (VIF) lebih kecil dari 10 antara lain adalah ukuran daerah $2,807 < 10$, tingkat kekayaan daerah $2,347 < 10$, ketertgantungan daerah $4,052 < 10$ dan temuan audit $1,162 < 10$ dan nilai *Tolerance* ukuran daerah $0,356 > 0,1$, tingkat kekayaan daerah $0,426 > 0,1$, ketertgantungan daerah $0,247 > 0,1$ dan temuan audit $0,861 > 0,1$ sehingga terbebas dari multikolinieritas.

3. Analisis Data

Setelah data yang digunakan terkumpul, maka langkah selanjutnya ialah menganalisis dan melakukan evaluasi terhadap data tersebut. Sebelum di analisis dan dievaluasi data terlebih dahulu diolah dengan menggunakan bantuan program SPSS (*Statistic Product and Service Solution*) Versi 16.0 yang kemudian hasil output tersebut akan dievaluasi untuk mengetahui pengaruh struktur modal dan piutang terhadap profitabilitas.

Tabel 4.4
Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Kinerja	.8869	.04356	33
Ukuran Daerah	20.7767	.49819	33
Tingkat Kekayaan Daerah	.0776	.06356	33
Ketertanggung Daerah	.7715	.09000	33
Temuan Audit	.2431	.30694	33

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Pada tabel 4.4 di atas diketahui nilai rata-rata dari variabel kinerja ialah 0,886 dengan standar deviasinya adalah 0,435, untuk variabel ukuran daerah nilai rata-ratanya ialah 20,776 dengan standar deviasinya adalah 0,498, untuk tingkat kekayaan daerah nilai rata-rata adalah 0,077 dengan standar deviasi 0,635, untuk ketertanggung daerah nilai rata-rata adalah 0,771 dengan standar deviasi 0,900 sedangkan untuk variabel temuan audit nilai rata-ratanya ialah 0,243 dengan standar deviasinya sebesar 0,306, dengan jumlah data sebanyak 33 data.

Tabel 4.5
Correlations

		Kinerja	Ukuran Daerah	Tingkat Kekayaan Daerah	Ketertanggung Daerah	Temuan Audit
Pearson Correlation	Kinerja	1.000	-.157	-.320	.225	-.124
	Ukuran Daerah	.157	1.000	.601	-.778	-.189
	Tingkat Kekayaan Daerah	.320	.601	1.000	-.743	-.141
	Ketertanggung Daerah	.225	-.778	-.743	1.000	-.010
	Temuan Audit	-.124	-.189	-.141	-.010	1.000
Sig. (1-tailed)	Kinerja	.	.204	.042	.116	.258
	Ukuran Daerah	.204	.	.000	.000	.159
	Tingkat Kekayaan Daerah	.042	.000	.	.000	.229
	Ketertanggung Daerah	.116	.000	.000	.	.479
	Temuan Audit	.258	.159	.229	.479	.
N	Kinerja	33	33	33	33	33

Ukuran Daerah	33	33	33	33	33
Tingkat Kekayaan Daerah	33	33	33	33	33
Ketertanggung Daerah	33	33	33	33	33
Temuan Audit	33	33	33	33	33

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SPSS, pada tabel 4.5 dapat diketahui:

- a. Nilai korelasi antara ukuran daerah dengan kinerja sebesar -1,57, cukup kuat.
- b. Nilai korelasi antara tingkat kekayaan daerah dengan kinerja adalah sebesar -0,320, cukup kuat.
- c. Nilai korelasi antara ketertanggung daerah dengan kinerja sebesar 0,225, cukup kuat.
- d. Nilai korelasi antara temuan audit dengan kinerja adalah sebesar -0,124, cukup kuat.

Dapat dilihat nilai korelasi yang terbesar yaitu korelasi antarakekayaan daerah dengan kinerja yaitu sebesar 0,739.

4. Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda bertujuan menghitung besarnya pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat dan memprediksi variabel terikat dengan menggunakan dua atau lebih variabel bebas. Pada penelitian ini, data diolah menggunakan *software* komputer yaitu SPSS (*Statistical Package for Social Science*) versi 16,0 (Ghozali, 2009). Maka model yang digunakan adalah sebagai berikut.

Tabel 4.6
Regresi Linier Berganda

Model		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.157	1.911		-.082	.937		
	UD	.320	.024	.528	2.580	.036	0,356	2,807
	TKD	.225	.005	.537	2.624	.064	0,426	2,347
	KD	.124	.004	.588	2.580	.026	0,247	4.052
	TA	.157	.009	.597	2.624	.064	0,861	1,162

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Daerah

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Berdasarkan tabel 4.6 tersebut diperoleh regresi linier berganda sebagai berikut

$$Y = 0,157 + 0,320 X_1 + 0,225 X_2 + 0,124 X_3 + 0,157 X_4 + e.$$

Interpretasi dari persamaan regresi linier berganda adalah:

- 1) Jika segala sesuatu pada variabel-variabel bebas dianggap tidak ada maka nilai Kinerja (Y) adalah sebesar 0,157%.
- 2) Jika terjadi peningkatan Ukuran Daerah sebesar Rp.1 juta, maka kinerja (Y) akan meningkat sebesar 0,32%.
- 3) Jika terjadi peningkatan Tingkat Ketergantungan Daerah sebesar Rp.1 juta, maka kinerja (Y) akan meningkat sebesar 0,225%
- 4) Jika terjadi peningkatan Tingkat Kekayaan Daerah sebesar Rp.1 juta, maka kinerja (Y) akan meningkat sebesar 0,004%
- 5) Jika terjadi peningkatan Temuan Audit sebesar Rp.1 juta, maka kinerja (Y) akan meningkat sebesar 0,157%

5. Uji Kesesuaian (*Test Goodness Of Fit*)

a. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji F (uji simultan) dilakukan untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya secara simultan. Cara yang digunakan adalah dengan melihat *level of significant* ($=0,05$). Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sedangkan formula H_0 dan H_a adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7
Uji Simultan

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.275	2	.637	9.568	.010^a
	Residual	.466	7	.067		
	Total	1.741	9			

a. Predictors: (Constant), UD, TKD, KD, dan TA

b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Daerah

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Berdasarkan tabel 4.7 di atas dapat dilihat bahwa F_{hitung} sebesar 9,568 sedangkan F_{tabel} sebesar 4,74 yang dapat dilihat pada $\alpha = 0,05$ (lihat lampiran tabel F). Probabilitas signifikan jauh lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,010 < 0,05$, maka model regresi dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan daerah dengan pusat dan temuan audit berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Maka hipotesis sebelumnya adalah Terima H_a (tolak H_0) atau hipotesis diterima.

b. Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Uji Parsial (Uji t) menunjukkan seberapa jauh variabel bebas secara individual menerangkan variasi pengujian ini dilakukan dengan menggunakan

tingkat signifikansi 5%. Jika nilai signifikansi $t < 0,05$ artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika nilai signifikansi $t > 0,05$ artinya tidak terdapat pengaruh antara satu variabel bebas terhadap variabel terikat.

Tabel 4.8
Uji Parsial
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.157	1.911		-.082	.937		
	UD	.320	.024	.528	2.580	.036	0,356	2,807
	TKD	.225	.005	.537	1.624	.064	0,426	2,347
	KD	.124	.004	.588	2.670	.026	0,247	4.052
	TA	.157	.009	.597	1.123	.064	0,861	1,162

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Daerah

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Berdasarkan tabel 4.8 diatas dapat dilihat bahwa:

- 1) Pengaruh Ukuran Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Pengujian signifikan dengan kriteria pengambilan keputusan:

Ha diterima dan H0 ditolak, apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $Sig. t < \alpha$

Ha ditolak dan H0 diterima, apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $Sig. t > \alpha$

t_{hitung} sebesar 2,580 sedangkan t_{tabel} sebesar 1,894 dan signifikan sebesar 0,036, sehingga $t_{hitung} 2,580 > t_{tabel} 1,894$ dan signifikan $0,036 < 0,05$, maka Ha diterima dan H0 ditolak, yang menyatakan ukuran daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja keuangan daerah.

- 2) Pengaruh Tingkat Ketergantungan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Pengujian signifikan dengan kriteria pengambilan keputusan:

Ha diterima dan H0 ditolak, apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $\text{Sig. } t < \alpha$

Ha ditolak dan H0 diterima, apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $\text{Sig. } t > \alpha$

t_{hitung} sebesar 1,624 sedangkan t_{tabel} sebesar 1,894 dan signifikan sebesar 0,064, sehingga $t_{hitung} 1,624 < t_{tabel} 1,894$ dan signifikan $0,064 > 0,05$, maka Ha diterima dan H0 ditolak, yang menyatakan Tingkat Ketergantungan Daerah tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

- 3) Pengaruh Kekayaan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Pengujian signifikan dengan kriteria pengambilan keputusan:

Ha diterima dan H0 ditolak, apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $\text{Sig. } t < \alpha$

Ha ditolak dan H0 diterima, apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $\text{Sig. } t > \alpha$

t_{hitung} sebesar 2,670 sedangkan t_{tabel} sebesar 1,894 dan signifikan sebesar 0,026, sehingga $t_{hitung} 2,670 > t_{tabel} 1,894$ dan signifikan $0,026 < 0,05$, maka Ha diterima dan H0 ditolak, yang menyatakan kekayaan daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja keuangan daerah.

- 4) Pengaruh Temuan Audit terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Pengujian signifikan dengan kriteria pengambilan keputusan:

Ha diterima dan H0 ditolak, apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $\text{Sig. } t < \alpha$

Ha ditolak dan H0 diterima, apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $\text{Sig. } t > \alpha$

t_{hitung} sebesar 2,123 sedangkan t_{tabel} sebesar 1,894 dan signifikan sebesar 0,064, sehingga $t_{hitung} 2,123 > t_{tabel} 1,894$ dan signifikan $0,064 > 0,05$, maka Ha

diterima dan H0 ditolak, yang menyatakan Temuan Audit tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

c. Koefisien Determinasi

Analisis koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui persentase besarnya variasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dari pengolahan data dengan menggunakan alat bantu aplikasi *Software SPSS 16.0 for Windows* maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini:

Tabel 4.9
Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.856 ^a	.732	.656	.25811

a. Predictors: (Constant), UD, TKD, KD, TA

b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Daerah

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 16.0

Berdasarkan tabel 4.8 di atas dapat dilihat bahwa angka *adjusted R Square* 0,656 yang dapat disebut koefisien determinasi yang dalam hal ini berarti 65,6% kinerja keuangan daerah dapat diperoleh dan dijelaskan Ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan daerah dengan pusat dan temuan audit. Sedangkan sisanya $100\% - 65,6\% = 34,4\%$ dijelaskan oleh faktor lain atau variabel diluar model penelitian.

B. Pembahasan.

1. Pengaruh Variabel Ukuran Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupten atau Kota di Provinsi Sumatera Utara.

Nilai t_{hitung} sebesar 2,580 sedangkan t_{tabel} sebesar 1,894 dan signifikan sebesar 0,036, sehingga $t_{hitung} 2,580 > t_{tabel} 1,894$ dan signifikan $0,036 < 0,05$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak, yang menyatakan ukuran daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja keuangan daerah. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Widya Astuti (2009) dan Yayuk Harumiyati (2012) yang menyatakan bahwa ukuran daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja keuangan daerah. Dengan besarnya ukuran daerah menunjukkan bahwasannya daerah tersebut memiliki sumber pendapatan yang besar baik dari pajak, retribusi dan penghasilan lainnya yang diterima daerah tersebut. Semakin besar ukuran daerah menunjukkan tingkat perekonomian yang besar dan dapat dijadikan modal oleh pemerintah untuk meningkatkan anggaran belanja yang digunakan untuk pembangunan ekonomi yang lebih luas dan mandiri.

2. Pengaruh Variabel Tingkat Ketergantungan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupten atau Kota di Provinsi Sumatera Utara

Nilai t_{hitung} sebesar 1,624 sedangkan t_{tabel} sebesar 1,894 dan signifikan sebesar 0,064, sehingga $t_{hitung} 1,624 < t_{tabel} 1,894$ dan signifikan $0,064 > 0,05$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak, yang menyatakan Tingkat Ketergantungan Daerah tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja keuangan pemerintah

daerah. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Widya Astuti (2009) dan Yayuk Harumiyati (2012) yang menyatakan bahwa tingkat ketergantungan daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja keuangan daerah. Semakin tinggi tingkat ketergantungan daerah maka tidak berdampak pada kinerja keuangan daerah. Dengan tingginya tingkat ketergantungan daerah menunjukkan bahwasannya daerah tersebut masih bergantung pada penerimaan dari pusat berupa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan bantuan lainnya. Tingkat ketergantungan yang tinggi menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tersebut masih rendah.

3. Pengaruh Variabel Kekayaan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupten atau Kota di Provinsi Sumatera Utara.

Nilai t_{hitung} sebesar 2,670 sedangkan t_{tabel} sebesar 1,894 dan signifikan sebesar 0,026, sehingga $t_{hitung} 2,670 > t_{tabel} 1,894$ dan signifikan $0,026 < 0,05$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak, yang menyatakan kekayaan daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja keuangan daerah. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Widya Astuti (2009) dan Yayuk Harumiyati (2012) yang menyatakan bahwa kekayaan daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja keuangan daerah. Adapun sumber pendapatan asli daerah dapat diperoleh dari pajak, dan retribusi serta pendapatan asli daerah lainnya. Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda baik dari sisi kekayaan alam maupun penduduknya. Dengan besarnya kekayaan daerah dapat menurunkan tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat dalam hal pembangunan karena daerah tersebut memiliki sumber pendapatan yang besar

namun apabila sumber pendapatan asli daerah masih kecil maka dibutuhkan peran dari pusat untuk menyeimbangkan pendapatan yang digunakan dalam anggaran pembangunan daerah tersebut.

4. Pengaruh Variabel Temuan Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupten atau Kota di Provinsi Sumatera Utara.

Nilai t_{hitung} sebesar 2,123 sedangkan t_{tabel} sebesar 1,894 dan signifikan sebesar 0,064, sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ 2,123 > 1,894 dan signifikan 0,064 < 0,05, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, yang menyatakan temuan audit tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Widya Astuti (2009) dan Yayuk Harumiyati (2012) yang menyatakan bahwa temuan audit berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja keuangan daerah. Dengan adanya temuan audit menunjukkan bahwa tata kelola keuangan pemerintah daerah masih belum sesuai dengan kaidh dan peraturan sesuai dengan undang-undang. Semakin besar temuan audit maka daerah tersebut memiliki potensi yang besar dalam hal kerugian. Temuan tersebut dapat disengaja ataupun tidak disengaja maka dari itu perlu komitmen yang kuat bagi instansi terkait untuk mengelola keuangan dengan prinsip yang lebih baik agar tidak merugikan keuangan daerah yang pada akhirnya dapat menurunkan kinerja pemerintah daerah tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel ukuran daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Utara.
2. Variabel tingkat kekayaan daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Utara.
3. Variabel tingkat ketergantungan daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan kinerja pemerintah Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Utara.
4. Variabel temuan audit secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Utara.
5. Ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan daerah dan temuan audit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatera Utara.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Pemerintah harus lebih memperhatikan alokasi anggaran yang proporsional guna untuk mengurangi tingkat ketimpangan antar daerah di Provinsi Sumatera Utara, alokasi anggaran ini harus mampu untuk mendorong agar pembangunan antar daerah guna peningkatan pertumbuhan ekonomian daerah bisa cepat dan nantinya tidak akan tertinggal dengan kabupaten/kota yang lainnya.
2. Pemerintah daerah perlu mencari alternatif lain untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tetap melihat kondisi dan potensi daerah yang dimiliki masing-masing daerah, sehingga tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat dapat berkurang, pemerintah juga perlu mengkaji ulang sektorsektor unggulan mana saja yang perlu ditingkatkan alokasi dananya sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara parsial.
3. Pemerintah Daerah harus berkomitmen dalam tata kelola pemerintahan berdasarkan pada *good corporate governance* agar tidak ditemukan temuan audit BPK yang dapat berpotensi pada kerugian pemerintah daerah dalam melaporkan kinerja pemerintah daerah.
4. Untuk penelitian berikutnya diharapkan menggunakan sampel penelitian yang lebih banyak, sehingga hasilnya akan lebih tergeneralisasi. Untuk penelitian selanjutnya dengan tema yang sama diharapkan menambah variabel lain yang mempengaruhi kemandirian pengelolaan keuangan dan

indeks pertumbuhan manusia, sehingga hasil penelitian bisa memiliki kontribusi yang berbeda dengan penelitian terdahulu. .

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

- Aliah, N. (2020). *The Role Of E-Filing In Improving Taxpayer Compliance In Indonesia. Accounting and Business Journal*, 2(1), 1-9.
- Arnita, V. (2018). Pengaruh Orangtua Terhadap Mahasiswa Akuntansi Dalam Pemilihan Karir Menjadi Profesi Akuntan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 4(2), 19-23.
- Astuti (2009). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (2013-2014)*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Barus, M. D. B., & Hakim, A. (2020). Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika melalui Metode *Practice Rehearsal Pairs* pada Siswa SMA Al-Hidayah Medan. *Biormatika: Jurnal ilmiah fakultas keguruan dan ilmu pendidikan*, 6(1), 74-78.
- Choiriyah, Umi. 2010. *Information Gop Pengungkapan Lingkungan Hidup di Indonesia*. Skripsi S1 Fakultas Ekonomi Universitas.
- Chrisna, H. (2018). Analisis Manajemen Persediaan Dalam Memaksimalkan Pengendalian Internal Persediaan Pada Pabrik Sepatu Ferradini Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(2), 82-92.
- Chrisna, H., Karin, A., & Hasibuan, H. A. (2020). Analisis Sistem Dan Prosedur Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Dengan Akad Pembiayaan Murabahah Pada PT. BANK BRI Syariah Cabang Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 11(1), 156-166.
- Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (studi kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia)*. Simposium Nasional Akuntansi XV
- Fadly, Y. (2011). *An Analysis Of Main Character Conflicts In M.J. Hyland's Carry Me Down*.
- Galang A (2016). *Pengaruh Kharakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. SNA 15 Makasar*.

- Hernawaty, H., Chrisna, H., & Noviani, N. (2020). Transaksi Valas Dalam Perspektif Konvensional Dan Syariah. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 11(1), 1-17.
- Indrarti (2011). *Hubungan Antara Opini Audit Pada Laporan Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Kinerja Keuangan Daerah*. Universitas Riau.
- Malikhah, I. (2019). Pengaruh Mutu Pelayanan, Pemahaman Sistem Operasional Prosedur Dan Sarana Pendukung Terhadap Kepuasan Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi. *JUMANT*, 11(1), 67-80.
- Mustikarini, dan Fitriasari. 2012. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah* Abdullah, S. dan Halim, A. 2009. *Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap belanja Pemerintah Daerah, Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali*. Udayana. Bali.
- Mustikarini, W. A. dan Fitriasari, D. (2009). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. *SNA 15*
- Nasser (2009). *Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia*. *Skripsi Sarjana*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Nasution, A. P. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa di Kecamatan Munte Kabupaten Karo.
- Nasution, D. A. D., & Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Implementasi *E-Budgeting* Terhadap Transparansi Keuangan Daerah Di Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(1), 669-693.
- Nasution, N. A., & Sari, W. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan (*Firm Size*) Dan Profitabilitas Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 11(1), 76-83.
- Saraswati, D. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Perimbangan sebagai Pemoderasi di Kabupaten/Kota Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(2), 54-68.

- Saraswati, D. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 110-120.
- Sari, A. K., Saputra, H., & Siahaan, A. P. U. (2017). *Effect of Fiscal Independence and Local Revenue Against Human Development Index. Int. J. Bus. Manag. Invent*, 6(7), 62-65.
- Sari, M. N. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Underpricing Saham pada Saat Initial Public Offering di Bursa Efek Indonesia.
- Setiawan, Wahyu. 2012. *Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia. Skripsi Sarjana*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Siregar, O. K. (2019). Pengaruh Deviden *Yield* Dan *Price Earning Ratio* Terhadap Return Saham Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 Sub Sektor Industri Otomotif. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 60-77.
- Sumarjo, Hendro. (2010). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/kota Di Indonesia*. Skripsi Sarjana. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Supraja, G. (2019). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL Dan Efektivitas Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1), 115-130.
- Syahrudin (2009). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (2013-2014)*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Veriza Nanda (2017). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Studi Kasus Di Kabupaten/Kota Se-Sumatera Tahun Anggaran (2013-2014)*. Universitas Bandar Lampung. Lampung.
- Widya Astuti (2009). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Di Indonesia Tahun Anggaran 2007*. Universitas Indonesia. Jakarta.

Yayuk Harumiati (2012). *Pengaruh Karakteristik Pemerinntah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun Anggaran 2011*. Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Yunus, R. N. (2019). Kemampuan Menulis Argumentasi Dalam Latar Belakang Skripsi Mahasiswa Manajemen Universitas Pembangunan Panca Budi. *Jumant*, 11(1), 207-216.

Buku :

Bastian, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*, Erlangga, Surabaya.

Ghozali, Imam. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 20*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali. 2009. *Aplikasih Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi Keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Halim, Abdul, (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salembah Empat, Jakarta.

Manullang dan Pakpahan (2014). *Metodologi Penelitian Proses Penelitian Praktis*. Penerbit Cipta Pustaka Media. Bandung.

Marihot dan Manuntun (2014). *Metode Penelitian Ilmiah*. Penerbit Cipta Pustaka Media. Bandung.

Rusiadi, et al, (2013). *Metode Penelitian Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi Pembanguna*. Medan : USU Press.

Sudarsana dan Rahardjo (2013). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Undang-undang :

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Web :

<http://www.bpk.depkeu.go.id>

<http://www.djpk.depkeu.go.id>